



Warmadewa Economic Development Journal

Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017

Maria Angelina Debbyang*, I Ketut Darma dan A. A. Sri Purnami

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

Correspondence: E-mail: debbyangelina08@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the influence on the number of motor vehicle tax (PKB) and the number of motorbike name transfer fees (BBNKB) on regional expenditure in Bali in the period 2003–2017. The method used is multiple linear regression analysis, classic assumption test and statistical test including F test (F-test) and t test (t-test). Test Result F (f-test) with a value of $\text{sig } 0,000 < 0,05$, then H_0 is accepted H_0 rejected. This means that there is a simultaneous significant effect between the variable number of Motor Vehicle Tax (PKB) and the Amount of Transfer of Vehicle Title (BBNKB) to Regional Expenditure in Bali Province. Obtained the results of the t test (t-test) with a significant value of X_1 of 0,000 smaller than 0.05. This means that the amount of motor vehicle tax has a significant effect on regional expenditure in Bali Province. While the significance value of X_2 is 0.221 greater than 0.05. This means that there is no significant influence on the number of motorbike name transfer fees (BBNKB) on regional expenditure in the Province of Bali.

ARTICLE INFO

How To Cite:

Debyang, M, A., Darma, I, K., Purnami, A, A, S.(2018). Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003–2017. *Warmadewa Economic Development Journal*. 1(2). 78-88. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/wedj.1.2.1100.78-88>

Article History:

Received
Revised
Accepted

Keywords:

Motor Vehicle Tax Amount,
Amount of Transfer Fee for Motor

1. PENDAHULUAN

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah sering disebut sebagai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik untuk provinsi maupun kota/kabupaten. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD (Nuarisa, 2014).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan daerah yang direalisasikan dalam bentuk pengadaan fasilitas, infrastruktur dan sarana prasarana yang ditujukan untuk kepentingan publik. Kebutuhan

daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik memengaruhi besarnya belanja modal. Sehingga pemerintah daerah seharusnya melakukan pergeseran komposisi belanja yang nantinya dapat meningkatkan kepercayaan publik (Andaiyani, 2013).

Salah satu sumber penerimaan yang potensial untuk terus digali dan dikembangkan adalah penerimaan dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber pendanaan dalam melaksanakan tanggung jawab negara untuk mengatasi masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran serta menjadi kontrak sosial antara warga negara dengan pemerintah.

Penerimaan terutama sektor pajak

diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan utama. Tidak berlebihan apabila setiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan. pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk mendapatkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan

bertanggung jawab.

Dari berbagai jenis pajak yang dijadikan sumber pendapatan, PKB dan BBNKB merupakan pajak yang paling potensial untuk dikembangkan di Provinsi Bali, karena melihat jumlah kendaraan yang cukup banyak sehingga bisa dijadikan sumber pendapatan daerah.

TABEL 1
PERKEMBANGAN BELANJA DAERAH, JUMLAH PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR (PKB) DAN JUMLAH BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR (BBNKB) PROVINSI BALI
TAHUN 2003-2017

TAHUN	BELANJA DAERAH (Miliar Rupiah)	PKB (Unit)	BBNKB (Unit)
2003	663,827	1,001,911	94,454
2004	840,373	1,081,742	175,516
2005	841,178	1,220,603	214,909
2006	1,215,474	1,270,671	152,094
2007	1,263,344	1,356,392	151,733
2008	1,464,226	1,483,713	205,132
2009	1,811,039	1,587,966	219,128
2010	1,985,850	1,715,675	502,677
2011	2,537,728	1,866,829	492,820
2012	3,562,732	1,946,777	715,590
2013	3,868,740	2,099,567	963,160
2014	3,868,740	2,207,962	278,549
2015	4,491,646	2,254,378	233,261
2016	4,999,031	2,234,630	201,151
2017	6,070,537	2,263,231	179,069

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2018

Dari tabel 1 dapat dilihat pengeluaran belanja daerah dan jumlah PKB selalu mengalami kenaikan sepanjang 15 tahun terakhir. Naiknya jumlah PKB akan berdampak positif pada PAD karena salah satu sumber pendapatan berasal dari pajak kendaraan bermotor dan akan mempengaruhi belanja daerah. Sedangkan jumlah BBNKB mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir, hal ini juga pasti akan berdampak pada PAD dan belanja daerah.

Walaupun jumlah kendaraan bermotor yang sangat besar jumlahnya di Provinsi Bali maka diharapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapatkan belum optimal. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wajib pajak yang tidak mendaftarkan ulang, tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Bapeda sebagai potensi pajak, serta adanya peminjaman KTP dan tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga

mengurangi potensi perolehan BBNKB. Efektivitas pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Bali juga masih belum Optimal, hal ini dapat dilihat dari pemahaman terhadap Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah, adanya keterlambatan membayar pajak, keterlambatan pelaporan pajak, adanya angsuran pajak, dan penerapan sanksi yang belum sempurna.

Pada penelitian sebelumnya, Anggraini, dkk (2015) menemukan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatra Selatan (Anggraini, Arisman, & Yunita, 2015). Penelitian lainnya dilakukan oleh Rakatitha dan Gayatri (2017), hasil penelitiannya menemukan kontribusi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh terhadap belanja daerah di Provinsi Bali (Rakatitha & Gayatri, 2017). Penelitian dari Wahfar, dkk (2014) dari jurnalnya yang berjudul Analisis Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie menunjukkan bahwa variabel PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie (Wahfar, Hamzah, & Mohd, 2014).

Pada dasarnya semua pendapatan yang diterima pemerintah daerah akan digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Selain itu, Semakin besar pendapatan yang diterima maka pemerintah daerah tersebut bisa mandiri atau tidak tergantung dari pemerintah pusat, demikian sebaliknya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (pasal 1 ayat 10 dan 9 PERDA Provinsi Bali No 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah).

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yang selanjutnya disingkat BBN-KB, adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha

(Kepmendagri No 25 tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 4). Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 18, Objek Pajak BBNKB adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat merupakan Kendaraan Bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat, dan jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima Gross Tonagge) sampai dengan 7 GT (tujuh Gross Tonagge). Dikecualikan dari penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor yaitu:

Kereta api;

Kendaraan Bermotor yang semata-mata dipergunakan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan

Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.

Belanja Daerah

Peraturan pemerintah nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada pasal 1 (ayat 13) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 pada pasal 1 (huruf q) menyebutkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, belanja daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah. Sedangkan menurut Permendagri No 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah diungkapkan pengertian belanja daerah yaitu belanja daerah daerah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada satu periode anggaran yang berupa arus aktiva keluar guna melaksanakan kewajiban,

wewenang, dan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah pusat.

3. METODE

Tempat Lokasi/ Daerah dan Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pendapatan Provinsi Bali yang beralamat di Jalan Kapten Cok Agung Tresna No.14, Denpasar. Obyek dari penelitian ini yaitu mengenai pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah.

Jenis Data

Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka atau dapat dihitung, seperti jumlah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor Provinsi Bali dan belanja daerah.

Data kualitatif

Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka-angka namun ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti penjelasan mengenai hubungan antara pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dan belanja daerah.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder yang merupakan data runtun waktu (time series) periode tahun 2003 sampai dengan tahun 2017.

Variabel Penelitian

Variabel Bebas

Variabel bebas adalah suatu variabel yang nantinya akan memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Variabel Terikat

Variabel terikat menerima berbagai akibat yang disebabkan oleh variabel bebas. Yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja Daerah Provinsi Bali Periode Tahun 2003-2017.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang

diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang biasanya berupa data kearsipan dan dokumentasi (Azwar, 2013). Dokumentasi adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi (Juliansyah, 2011). Untuk mendapatkan data, peneliti mengumpulkan data berupa data dari dokumen Dinas Pendapatan Daerah dan BPS Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang pada prinsipnya berwujud kata-kata dari pada angka digunakan untuk melengkapi dan mendukung analisis kuantitatif yaitu berupa uraian dari data yang akan dianalisis dalam bentuk deskripsi data dan hasil penelitian sehingga mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang hasil penelitian.

Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang berbentuk bilangan atau angka-angka (Sugiyono, 2014). Teknik analisis yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear berganda.

Analisis regresi linier berganda adalah suatu teknik ketergantungan. Regresi linier berganda digunakan untuk memprediksi hubungan diantara lebih dari dua variabel (Sugiyono, 2014). Formulasi persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e_i$$

Keterangan:

Y = Belanja Daerah

a = nilai konstan

X1 = Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

X2 = Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

b1 = koefisien regresi dari PKB (X1)

b2 = koefisien regresi dari BBNKB (X2)

e_i = koefisien pengganggu

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah data penelitian terdapat pelanggaran atau tidak. Uji asumsi klasik ini digunakan untuk memenuhi syarat dalam analisis regresi linear berganda. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

apakah hasil regresi yang diperoleh benar-benar memiliki sifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*) atau apakah sudah memiliki kriteria ekonometrika dalam arti tidak terjadi penyimpangan yang cukup serius dari asumsi-asumsi yang diperlukan. Uji asumsi klasik meliputi:

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang dipergunakan telah terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Kolmogorof Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku.

Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi berganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa variabel-variabel bebas dalam persamaan tersebut tidak saling berkorelasi (Djalal & Usmani, 2002). Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas akan dilihat dari variante inflation factor (VIF), Tolerance mengukur varibialitas variabel bebas yang dipilih yang tidak dapan dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan VIF lebih besar dari 10 maka model regresi ada indikasi terjadi multikolinieritas begitu juga sebaliknya (Ghozali, 2002).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila pola sebaran residual menunjukkan hubungan yang sistematis hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas. Pada penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan metode grafik.

Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi ada kolerasi antara kesalahan pada periode sebelumnya. Autokolerasi muncul karena observasi yang

beruntun sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya (Ghozali, 2002). Adapun cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokolerasi adalah dengan menggunakan Durbin Watson dari SPSS.

Uji Statistik

Uji F (F-Test)

Uji ini dipergunakan untuk mengetahui secara simultan apakah variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat atau tidak. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada derajat kepercayaan sebesar 5%. Semakin jauh dari nol mencerminkan adanya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dengan variabel tak bebasnya secara keseluruhan.

Uji t (t-test)

Uji t merupakan suatu pengujian secara parsial yang bertujuan untuk mengetahui apakah koefisien regresi berpengaruh signifikan atau tidak berpengaruh signifikan. Pengujian "t" dapat dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel atau melihat signifikan "t"-nya dengan derajat kepercayaan sebesar 5%.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kualitatif

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk runtun waktu (time series) dengan interval waktu 15 tahun yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh dari dinas pendapatan Provinsi Bali dan BPS Provinsi Bali. Adapun data yang diperoleh yaitu data mengenai perkembangan jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB), jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan total pengeluaran belanja daerah Provinsi Bali.

Realisasi perkembangan jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB), jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan total pengeluaran belanja daerah Provinsi Bali dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat pada gambar 1 berikut

Berdasarkan gambar 1, jumlah PKB selalu meningkat tiap tahun dibandingkan dengan jumlah BBNKB yang selalu mengalami fluktuasi sejak 15 tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran belanja daerah selalu meningkat tiap tahunnya tidak sebanding dengan pendapatan yang diperoleh dari PKB dan BBNKB, tetapi bisa di tutupi dengan pendapatan yang lainnya.

Dari gambar diatas, dapat diperoleh nilai rata-rata belanja daerah (Y) yaitu 2,632,297 miliar dengan nilai paling rendah 663,827 miliar pada tahun 2003 dan nilai paling tinggi 6,070,537 miliar pada tahun 2017 serta mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini sangat berdampak positif bagi perekonomian Provinsi Bali, karena semakin baik infrastruktur maka akan semakin lancar laju perenekonoian.

Pada variabel jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) (X1) nilai rata-ratanya sebesar 1,646,067 unit dengan nilai paling rendah sebesar 1,001,911 unit pada tahun 2003 dan nilai paling tinggi sebesar 2,263,231 unit pada tahun 2017 serta mengalami peningkatan selama 15 tahun terakhir. Semakin banyak

kendaraan yang membayar pajak maka akan semakin berdampak positif pada PAD, karena semakin tinggi PAD maka akan semakin besar belanja daerah begitupun sebaliknya.

Pada variabel bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) nilai rata-rata sebesar 318,616 unit dengan nilai paling rendah sebesar 94,454 unit pada tahun 2003 dan nilai paling tinggi sebesar 963,160 unit pada tahun 2013 serta mengalami fluktuasi selama 15 tahun terakhir. Dilihat dari jumlah yang membayar BBNKB sangat kecil dibandingkan PKB. Oleh karena itu perlu dicarikan solusi agar bisa meningkatkan pendapatan dari sektor BBNKB ini, karena merupakan salah satu pendapatan utama dari sektor pajak.



Gambar 1

Realisasi Perkembangan belanja daerah, jumlah PKB dan jumlah BBNKB Provinsi Bali Tahun 2003-2017
Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Bali 2018.

Analisis Kuantitatif

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan prasyarat analisis regresi linier berganda. Dalam penelitian ini perlu dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu yang meliputi: Uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedasitas.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jika signifikan dari nilai Asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi secara normal.

Tabel 2

Uji Normalitas
Hasil Uji Normalitas

Variabel Terikat	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig
Belanja Daerah	0,735	0,652

Berdasarkan tabel 2 hasil uji Kolmogorov-Smirnov nilai signifikasinya sebesar 0,652 maka dapat diambil kesimpulan bahwadata residual terdistribusi normal karena signifikansi nilai Asymp.sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Metode untuk mengetahui adanya multikolinearitas dalam model regresi adalah terlihat dari nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF). Sebagai dasar acuannya jika nilai tolerance > 0,1 dan nilai variance inflation factor < 1.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

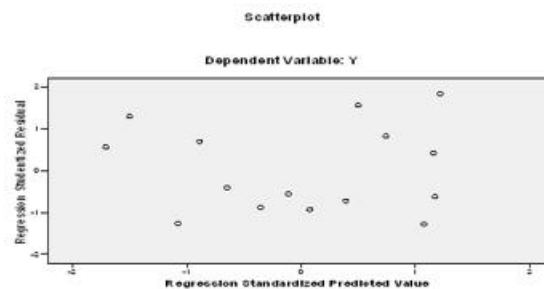
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig	Colinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1(Constant)	-3.462	.776		-4.463	.001		
x1	2.612	.147	1.025	17.820	.000	.697	1.434
x2	.084	.065	.074	1.290	.221	.697	1.434

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai yang didapat adalah (X1) nilai tolerance sebesar 0,697 dengan nilai VIF sebesar 1,434, dan (X2) nilai tolerance sebesar 0,697 dengan nilai VIF sebesar 1,434. Jadi semua variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji ini

dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (Z-pred) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah distudentized. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi gejala heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya

korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Model uji yang baik adalah terbebas dari autokorelasi. Uji Autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson terhadap variabel pengganggu (disturbance error term) nya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dibandingkan dengan tabel Durbin Watson (dl dan du). Kriteria jika $du < d < dl$ hitung < 4-du maka tidak terjadi autokorelasi.

Tabel 4
Nilai Durbin Watson

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of	Durbin-Watson
1	0.986a	0.972	0.968	0.05610	1.752

Kriterianya:

Jika nilai $du < dw < 4-du$ maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai Durbin-Watson tabel bisa dilihat pada tabel Durbin-Watson (k,n) jadi (2,15) (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai du dan dl maka nilai du dan dl adalah 1,543 dan 0,946. Maka nilai autokorelasi diantara $1,543 < 1,752 < 2,457$. Diketahui bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,752 ini

berarti daerah tidak ada autokorelasi, maka dapat dikatakan bahwa semua instrumen variabel tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 5 yaitu sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig	Colinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-3.462	.776		-4.463	.001		
x1	2.612	.147	1.025	17.820	.000	.697	1.434
x2	.084	.065	.074	1.290	.221	.697	1.434

Berdasarkan Tabel 5 dapat dibuat suatu model persamaan regresi linear berganda yaitu sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

$$Y = -3,462 + 2,612X_1 + 0,084X_2$$

Persamaan regresi tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Nilai koefisien b1 sebesar 2,612 artinya jika jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) (X1) bertambah sebesar 1 unit maka belanja daerah (Y) akan naik sebesar 2,612 miliar dengan asumsi variabel lainnya atau jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) adalah konstan.

Nilai koefisien b2 sebesar 0,084, artinya jika jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) (X2) bertambah sebesar 1 unit maka belanja daerah (Y) akan naik sebesar 0,084

miliar dengan asumsi variabel lainnya atau jumlah pajak kendaraan bermotor (BBNKB) (X1) adalah konstan.

Besarnya kedua variabel bebas dapat diketahui melalui R Square yaitu sebesar 0,972. Angka ini dapat diartikan bahwa variasi variabel belanja daerah (Y) dapat dipengaruhi oleh variabel Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (X1), dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (X2) sebesar 97,2%, sedangkan sisanya sebesar 2,8% dipengaruhi oleh pendapatan-pendapatan lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji F (F-test)

Uji F (F-test) bertujuan untuk menguji apakah semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat dan untuk mengetahui model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak.

Tabel 6
Uji F (F-test)
ANNOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	1.327	2	.663	210.713	.000
Residual	.038	12	.003		
Total	1.364	14			

Menentukan formulasi hipotesis

$H_0 : b_1 = b_2 = 0$, ini berarti tidak signifikan dan berpengaruh pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor secara simultan terhadap belanja

daerah.

$H_a : b_1 = b_2 \neq 0$, ini berarti ada pengaruh signifikan secara simultan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap belanja daerah Provinsi Bali.

Kriteria Pengujian

Jika sig < 0,05 maka Ha diterima

Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak

Keputusan

Berdasarkan Tabel 6 diperoleh nilai dari signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Maka Ha diterima Ho ditolak ini berarti bahwa ada pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap

Belanja Daerah Provinsi Bali.

Uji t (t-test)

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien regresi, sehingga diketahui apakah secara parsial Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali adalah memang terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh secara kebetulan.

Tabel 7
Uji t-test

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	sig	Colinearity Statistic	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	3.462	.776		-4.463	.001		
x1	2.612	.147	1.025	17.820	.000	.697	1.434
x2	.084	.065	.074	1.290	.221	.697	1.434

Untuk menguji signifikansi secara parsial pajak kendaraan bermotor (PKB) berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Bali adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh secara kebetulan.

Langkah-langkah Uji statistiknya adalah:

Membuat Formulasi Hipotesis

$H_0: b_1 = 0$, ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan (nyata) secara parsial jumlah pajak kendaraan bermotor (X1) terhadap belanja daerah (Y).

$H_a: b_1 \neq 0$, ini berarti ada pengaruh signifikan (nyata) secara parsial jumlah pajak kendaraan bermotor (X1) terhadap belanja daerah (Y).

Kriteria Pengujian

Jika sig < 0,05 maka Ha diterima

Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak

Keputusan

Pada variabel jumlah pajak kendaraan bermotor tingkat signifikannya sebesar 0,000 lebih kecil dibandingkan dengan 0,05, maka Ha diterima dan Ho ditolak. Ini berarti bahwa jumlah pajak kendaraan bermotor berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Bali.

Untuk menguji signifikansi secara parsial jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap belanja daerah Provinsi Bali adalah memang nyata terjadi (signifikan) atau hanya diperoleh secara kebetulan.

Langkah-langkah Uji statistiknya adalah:

Membuat Formulasi Hipotesis

$H_0: b_1 = 0$, ini berarti tidak ada pengaruh yang signifikan (nyata) secara parsial jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (X2) terhadap belanja daerah (Y).

$H_a: b_1 \neq 0$, ini berarti ada pengaruh signifikan (nyata) secara parsial jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (X2) terhadap belanja daerah (Y).

Kriteria Pengujian

Jika sig < 0,05 maka Ha diterima

Jika sig > 0,05 maka Ho ditolak

Keputusan

Pada variabel jumlah pajak kendaraan bermotor tingkat signifikannya sebesar 0,221 lebih besar dibandingkan dengan 0,05, maka Ha ditolak dan Ho diterima. Ini berarti tidak ada pengaruh signifikan jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap belanja daerah Provinsi Bali.

Pembahasan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap variabel independen yaitu Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

Pengaruh Jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan dari X1 sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti jumlah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali. Hasil penelitian ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraini, dkk (2015) yang menyatakan variabel Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2012-2014. Selain itu hasil penelitian Rakatitha dan Gayatri (2017) menjelaskan bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif pada pendapatan asli daerah Provinsi Bali tahun 2013-2016 (Anggraini et al., 2015; Rakatitha & Gayatri, 2017).

Setiap tahun anggaran, target penerimaan pajak daerah selalu mengalami kenaikan, keberhasilan dan merealisasikan target penerimaan pajak daerah ini selalu diiringi dengan peningkatan target penerimaan dari sektor lain diluar pajak daerah. Hal ini tentu berdampak pada kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan, seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Semakin besar dana Pendapatan Asli Daerah berarti semakin besar belanja daerah yang dilakukan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerahnya masing-masing.

Pengaruh Jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Belanja Daerah Provinsi Bali

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa jumlah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Bali. Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat nilai signifikan dari X2 sebesar 0,221 lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Ini berarti tidak ada pengaruh antara jumlah bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) terhadap belanja daerah Provinsi Bali. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rakhmad Rinaldi Wahfar, Abubakar Hamzah I, Mohd. Nur Syechalad II (2014) yang menjelaskan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie tahun 2004-2013.

Dari tabel 1 dapat dilihat jumlah yang membayar BBNKB sangat kecil dibandingkan PKB. Kecilnya kontribusi BBNKB disebabkan oleh beberapa hal, seperti yang dijelaskan kepala dispenda Provinsi Bali I Made Santha (Antaraneews Bali, 2018) Pemerintah Provinsi Bali memprediksi mengalami kerugian mencapai sekitar Rp4,6 miliar karena adanya kendaraan berplat luar yang masuk ke Pulau Dewata, namun sulit untuk dilakukan mutasi. Berdasarkan data hasil razia gabungan Ditlantas Polda Bali, Dinas Perhubungan, maupun Satpol PP serta hasil kunjungan kepada pengusaha, pada 2017 terdapat 1.879 unit kendaraan luar yang masuk ke Bali. Penyebabnya, kendaraan-kendaraan itu sebagian sudah dicabut berkasnya di daerah asal. Namun, ketika akan dimutasi di Bali terganjal adanya Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diantaranya membatasi usia kendaraan yang boleh beroperasi di jalan. Banyak mobil luar daerah yang sudah telanjur beroperasi di Bali. Jadi perlu pemikiran yang serius buat kami.

Di satu sisi ada aturan tidak boleh diperpanjang dan tidak akan disamsat, tetapi kendaraan sudah kadung di Bali. Mereka tidak bayar pajak karena aturan yang tidak memungkinkan. Pada tahun 2017 (Rhismawati, 2018) kepala dispenda juga menjelaskan pendapatan dari BBNKB, khususnya BBNKB 1 bagi kendaraan baru, tetap masih menjadi persoalan. Berdasarkan data yang didapatkan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) juga memprediksi tahun ini terjadi penurunan penjualan sekitar 18-20 persen. Menurut dia, hal yang tidak jauh berbeda juga disampaikan oleh Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) dan Asosiasi Dealer, bahwa penjualan kendaraan bermotor tahun ini belum terlalu menggembirakan. Santha mengemukakan, realisasi pendapatan dari BBNKB pada 2016

hanya sebesar 87 persen, dari target sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp1,1 triliun lebih. "Itupun cukup tertolong dari BBNKB untuk kendaraan second. Dengan demikian, hal itu berimbas pada pendapatan asli daerah (PAD) pada 2016 yang hanya mencapai 96 persen, dari target yang ditetapkan sebesar Rp3,172 triliun. "Yang tercapai itu justru hanya di sektor pajak kendaraan bermotor sebesar 102 persen".

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan, walaupun BBNKB merupakan salah satu pendapatan asli daerah, tetapi jika dilihat realisasi yang diperoleh sangat kecil dibandingkan PKB. Hal ini pasti akan berdampak pada PAD dan akan berpengaruh pada belanja daerah. Karena semakin banyak pendapatan asli daerah (PAD) yang di kumpulkan maka akan semakin besar pengeluaran untuk belanja daerah, begitupun sebaliknya.

5. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan serta dari hipotesis yang telah disusun dan telah diuji pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah provinsi Bali.
- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Provinsi Bali.
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak signifikan berpengaruh terhadap Belanja Daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Andaiyani. (2013). Pengaruh Indeks Pembangunan Operasional Terhadap Jumlah Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 1(1), 1–13.
- Anggraini, M., Arisman, A., & Yunita, C. (2015). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan. *Eprint STMIK GI MDP*. Retrieved from <http://eprints.mdp.ac.id/1848/1/Jurnal.pdf>
- Azwar, S. (2013). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djalal, N., & Usmani, H. (2002). *Penggunaan Teknik Ekonometri, Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ghozali, I. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi Keempat*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Juliansyah, N. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nuarisa, S. A. (2014). Pengaruh PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369. <https://doi.org/ISSN 2252-6765>
- Rakatitha, P. N. K., & Gayatri. (2017). Pengaruh Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Jendaraan Bermotor pada Pendapatan Asli Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(2), 1575–1600.
- Rhismawati, N. L. (2018). Bali rugi Rp4,6 miliar terkait mutasi kendaraan. Retrieved from <https://bali.antaranews.com/berita/126437/bali-rugi-rp46-miliar-terkait-mutasi-kendaraan>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahfar, R. R., Hamzah, A., & Mohd, N. S. (2014). Analisis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Sebagai Salah Satu Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. *Jurnal Ilmu Ekonomi Unsyiah*, 2(1), 70–79.